

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 0479/PDT.G/2019/PA.SDA TENTANG
CERAI GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI MURTAD**

SKRIPSI

Oleh :

Devita Ayu Anggraeni

NIM. C91217101



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devita Ayu Anggraeni
NIM : C91217101
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/Pa.Sda tentang
Ceraai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Suarabaya, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, 'DB9AHF897380102' in the middle, and '6000' at the bottom. The signature is in black ink.

Devita Ayu Anggraeni
NIM. C91217101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Anggraeni NIM. C91217101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Anggraeni NIM.C91217101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP.195704231986032001

Penguji II



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag

NIP.197904162006042002

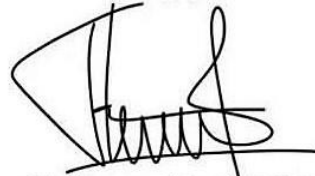
Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP.198710022015031005

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, MH

NIP.199111102019031017

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.19590404198803100

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVITA AYU ANGGRAENI
NIM : C91217101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : devitaayua199@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR

0479/PDT.G/2019/PA.SDA TENTANG CERAH GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH

ISTRI MURTAD

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Penulis

(Devita Ayu Anggraeni)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad” ini merupakan penelitian yang memiliki rumusan masalah antara lain yang pertama bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim PA Sidoarjo Nomor 0479/ Pdt.G /2019/ PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad? adapun yang kedua bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim PA Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad?.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datanya terhimpun dengan metode *documentary* (kepuustakaan) yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pendekatan induktif yang mendeskripsikan Putusan PA Sidoarjo dengan perkara nomor 0479/ Pdt.G/2019/ PA.Sda yang secara khusus kemudian akan dilihat berdasarkan yuridis dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai dasar hukum untuk menerima perkara dan memutus *talak satu ba'in sughra* karena mengacu pada pokok gugatan Penggugat sehingga merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) KHI dimana perceraian karena perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh Perbuatan Tergugat yang tidak menuntun istrinya yang muallaf sehingga Penggugat kembali pada agamanya semula dan ia tidak diberi nafkah oleh Penggugat. Secara yuridis, murtad tidak memutus perkawinan melainkan dengan keputusan Pengadilan, sedangkan dalam Hukum Islam murtad dapat membatalkan perkawinan saat itu juga. Persoalan murtad haruslah diteliti kebenarannya dan dipertimbangkan dasar hukumnya karena berpengaruh pada akibat hukum.

Sebagai saran, hendaknya Pemerintah merumuskan pembaruan hukum yang jelas untuk pemecahan masalah status perkawinan bagi orang murtad agar tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Majelis Hakim pun hendaknya meneliti tentang fakta yang ada demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum. Dan hendaknya masyarakat tidak menjadikan agama sebagai status untuk melegalkan ikatan perkawinan karena ini berkaitan dengan aqidah dan cukup berdampak bagi yang lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PUTUSNYA PERKAWINAN DAN MURTAD MENURUT YURIDIS DAN HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian Putusnya Perkawinan	23
B. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan.....	24
C. Alasan atau Penyebab Perceraian.....	44
D. Akibat Putusnya Perkawinan.....	47
E. Murtad dalam Perkawinan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya peradaban menekankan bahwa manusia beberapa kali mengalami perubahan dalam berbagai jenis bidang. Begitupun permasalahan yang ada dalam masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Manusia selaku makhluk Allah SWT diatur oleh tata hukum dalam berperilaku agar tidak menciptakan kerugian dalam bermasyarakat. Allah SWT menjadikan makhlukNya sebagai makhluk sosial sehingga mereka senantiasa tolong menolong dan saling membutuhkan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karenanya kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi baik secara dzhahir maupun batin. Karena adanya perbedaan dalam setiap individu, diperlukan sebuah peranan seperti hukum untuk memecahkan permasalahan dan kepastian hukum dalam tatanan kehidupan sebagai pengendali sosial.¹

Sebagai negara yang menjunjung nilai keadilan serta kepastian hukum, Indonesia telah mengeluarkan berbagai Undang-Undang guna mengatur masyarakatnya. Salah satu problem yang sering muncul dalam masyarakat ialah perihal kehidupan pernikahan dan hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya perundang-undangan

¹ Abdul manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

Disebutkan bahwa “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, berdasrakan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Masih mempunyai makna yang hampir sama, disebutkan juga dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Dari uraian pengertian bisa dipahami kalau perkawinan ialah suatu akad yang menyatukan dua keluarga, mampu memusnahkan batasan-batasan pergaulan dan menghalalkan hubungan yang bukan mahramnya.⁴ Manusia dianugerahi rasa cinta dan kasih sayang sehingga condong pada rasa ingin hidup bersama dalam satu keluarga seperti halnya yang tercantum dalam Firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ۚ قُلَىٰ أَلَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374.

Begitu mulianya ikatan pernikahan hingga dalam ajaran Islam disebutkan bahwa nikah merupakan penyempurna agama,⁶ bahkan ibadahnya orang yang telah menikah pahalanya akan dilipatgandakan ketika aktivitas ibadah tersebut dilakukan bersama-sama. Pernikahan dapat menjadi salah satu metode peningkatan solidaritas seraya mempererat tali silaturahmi. Pernikahan harus dijaga demi tercapainya tujuan pernikahan.

Setiap keluarga pasti mengharapkan rumahtangga yang harmonis, romantis, bahagia dan sejahtera. Namun realitanya dalam menjalani bahtera rumah tangga pasti terdapat lika-liku permasalahan yang menimpa hingga timbulnya keadaan yang dapat berujung pada putusnya perkawinan. Islam tidak melarang perceraian selama dijalankan sesuai dengan Syariat terbukti dengan adanya dalil-dalil dibolehkannya talak atau perceraian.⁷ Meski halal, namun perceraian tidaklah disukai oleh Allah SWT.

Bercerai menjadi solusi terakhir saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga ketika segala cara telah dilakukan agar tetap bertahan namun tetap tak terjadi perubahan. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Diketahui bahwa putusnya

⁶ Yuli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 61.

[illegible]

Selain itu terdapat penyebab lain yang dapat menjadi alasan untuk bercerai yaitu adanya unsur beralih agama atau murtad. Perceraian dengan unsur murtad ini menimbulkan problematika dalam penyelesaian perkaranya. Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan tentang peralihan agama menjadi penyebab terjadi putusnya perkawinan, hal ini didasari latar belakang negara Indonesia yang menjamin hak kebebasan beragama mengingat penduduk di Indonesia yang meski sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, namun juga tidak sedikit warga negaranya yang beragama lain.

Meski begitu, dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengatakan bahwa jika salah satu pasangan baik suami atau istri meninggalkan agamanya (murtad) sehingga menyebabkan rumah tangga tidak rukun maka dapat melatarbelakangi perceraian. Setiap adanya perkawinan telah diatur untuk dicatatkan perkawinannya guna mendapatkan kepastian hukum. Dan berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa

[illegible]

perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sehingga perkawinan mempunyai hubungan kerohanian yang mengakibatkan tanggung jawab secara jasmani dan rohani. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan menurut kepercayaan masing-masing pihak juga merupakan syarat sah tidaknya perkawinan. Secara yuridis dan hukum Islam, telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama diharamkan untuk melaksanakan perkawinan, dan apabila itu terjadi maka perkawinannya dapat diputus.

Salah satu studi kasus tentang problem ini adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda dengan duduk perkara bahwa pihak yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Keduanya resmi menikah pada 16 April 2011 dan pernikahannya tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 188/42/IV/2011. Bahwa sebelumnya Penggugat beragama kristen yang kemudian saat menikah ia mengikrarkan syahadat dan menyatakan diri masuk islam untuk mengikuti suaminya. Dalam perjalanan rumah tangganya, mereka tidak dikaruniai anak. Pada pertengahan 2017 mulai terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terjadi perselisihan secara terus menerus yang dilatarbelakangi oleh pihak Tergugat yang tidak mau melakukan kewajibannya sebagai imam yang baik. Tergugat tidak mau beribadah selayaknya orang beragama Islam meski sering diperingatkan oleh Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat kesal karena ia tidak dituntun

Berdasarkan deskripsi putusan tersebut, jika ditinjau dari hukum positif, penyelesaian perceraian sebab murtad tidak langsung memutuskan perkawinan begitu saja melainkan harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Hal ini disesuaikan dengan peraturan hukum di Indonesia demi terwujudnya asas kepastian hukum dan mempersulit perceraian. Oleh karenanya ketika salah satu dari pasangan suami istri merasa keberatan

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, unsur murtad dapat memutus perkawinan saat itu juga dan berakibat hukum *fasakh*, dimana *fasakh* merupakan pembatalan perkawinan yang tidak memungkinkan perkawinan dapat diteruskan. Putusan talak dengan *fasakh* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika talak memiliki akibat hukum seperti kewajiban ‘*iddah*, pemberian nafkah serta *mut’ah*, *hadhanah*, dan lain sebagainya, berbanding terbalik dengan *fasakh*. Sebagai lembaga yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dalam memberi putusan diharapkan dapat mengadili perkara sebaik-baiknya dengan berpedoman pada yuridis dan hukum Islam dengan memperhatikan *maslahah* dan *mudharat* dari perkara yang dihadapi.

Demikian atas uraian diatas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai problematika tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam judul skripsi “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad’*”.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan berbagai identifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka harus ada pembatasan ruang lingkup permasalahan agar pembahasan tidak meluas. Oleh karenanya penulis membatasi permasalahannya pada perkara berikut:

- [illegible]

Persamaan dengan yang akan dikaji oleh Penulis ialah pembahasannya sama-sama perkara cerai gugat dengan adanya unsur murtad. Sedangkan Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji terutama putusannya, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang proses berperkara dan dasar pertimbangan hakim yang berujung pada putusan *fasakh*, sedangkan yang penulis kaji adalah pertimbangan hakim yang memutus talak satu *bain sughra* kemudian Penulis menganalisisnya secara yuridis dan hukum islam.⁹

- ⁹ Mashuda, “Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)” (Skripsi—Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019).

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Tri Wahyuni NIM 115010109111011 Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Gugatan Cerai pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Alasan Suami Seorang “Waria” Sehingga menyebabkan cekcok terus menerus”. Didalamnya membahas tentang tinjauan yuridis pada cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suaminya waria sehingga sering terjadi cekcok. Dalam UU Perkawinan dan KHI telah menyebutkan alasan perceraian yang diperbolehkan dengan jelas, namun perkara tentang waria tidak ada perumusan yang jelas. Sehingga dalam perkara ini hakim menggunakan dasar pertimbangan bahwasannya akibat Tergugat sering berdandan dan bersikap seperti seorang wanita hingga memicu perselisihan terus menerus. Adapun dalam menjatuhkan putusan cerai hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharan

[illegible]

Persamaan artikel ilmiah tersebut dengan skripsi yang ditulis Penulis ialah sama-sama membahas cerai gugat dengan pertimbangan hakim perselisihan secara terus-menerus. Adapun perbedaannya jika artikel tersebut dilatarbelakangi oleh sikap suami yang berkelakuan seperti wanita kemudian di analisis secara yuridis, sedangkan yang penulis kaji adalah putusan cerai gugat dengan unsur murtad yang kemudian di analisis secara yuridis dan hukum islam.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Eva Haryati NIM 132111102 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini membahas dikabulkannya gugatan cerai seorang istri kepada suaminya yang menderita sakit saraf terbukti ia jalan-jalan telanjang, suka menyanyi-nyanyi, sering menyakiti istrinya tanpa alasan yang jelas, saksi-saksi dari pihak Penggugat pun membenarkan keterangan tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan keterangan. Putusan talak *bain sughra* dijatuhkan dengan dasar pertimbangan hakim baik secara formil

[illegible]

Persamaannya dengan skripsi penulis adalah tentang perkara cerai gugat yang diputus talak *bain sughra*. Adapun perbedaannya jika skripsi tersebut merupakan perkara cerai gugat sebab suami mengidap sakit saraf dan putusannya dianalisis menurut *maqashid al-syariah* sedangkan yang penulis teliti adalah cerai gugat dengan unsur murtad dan dianalisis secara yuridis dan hukum islam.¹²

sakit saraf dan putusannya dianalisis menurut *maqashid* sedangkan yang penulis teliti adalah cerai gugat dengan unsur *ma'at* dan dianalisis secara yuridis dan hukum islam.¹²

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan diatas, jejak penelitian yang akan dikaji oleh penulis berbeda dengan penelitian

a Haryati, “Ceraai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (*Analisis Maqashid* Mengidap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)” (Skripsi: Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

4. *Murtad*

Maka dari itu maksud dari penelitian ini ialah menganalisis secara yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum yang dipakai hakim pada perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad pada Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/ PA.Sda.

[illegible]

1. Data yang Dikumpulkan

a. Salinan Putusan PA Sidoarjo nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda, pertimbangan Majelis Hakim dalam merumuskan dasar hukum Putusan Nomor nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;

b. Landasan teori tentang putusnya perkawinan dan murtad, meliputi pengertian putusnya perkawinan, bentuk-bentuk putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, alasan yang menjadi latar belakang perceraian, dan status perkawinan dimana salah satu pihaknya murtad;

c. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

d. Buku dan kitab *fiqih* atau pendapat *fuqaha'*

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap dan penjelas dari sumber data primer, bahwa peneliti memperoleh data dari beberapa sumber yang sudah ada.¹⁶ Adapun sumber data sekunder yang digunakan berupa kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen baik tentang perceraian, murtad, ataupun hukum perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi agar dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Tak lupa digunakannya juga peraturan perundang-undangan dan kitab hukum Islam sebagai penjelas sekaligus rujukan analisis seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih empat madzhab, dan lain-lain.

¹⁶ Ibid.

Teknik yang digunakan ialah *Documentary* (kepuustakaan), yaitu suatu metode dikumpulkannya data kualitatif dengan melihat atau menganalisis catatan dokumen yang diteliti atau dokumen lain yang berkaitan baik berupa arsip, berkas, atau literatur. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda yang didukung juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dengan mencari referensi dari buku dan kitab yang relevan dengan pembahasan perkawinan seperti Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Indonesia oleh Moch.Isnaeni, Fikih Empat Madzhab oleh Abdurrahman Al-Zujairi, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Sesudah mengumpulkan data yang dibutuhkan, perlu dilakukannya pengolahan data sebelum dilakukannya analisa. Di bawah ini merupakan teknik yang digunakan antara lain:

a. Penyuntingan Data (*Editing*)

Proses *editing* merupakan suatu aktivitas memeriksa atau meneliti lagi terkumpulnya data dengan memilah dan menyeleksi data yang ada dari berbagai sisi baik tentang kesesuaian dan hubungannya dengan persoalan penelitian. Maka

b. Pengorganisasian Data (*Organizing*)

5. Teknik Analisis Data

[illegible]

Agar pembahasan dapat dicerna dengan mudah, perlu adanya sistematika pembahasan demi kepenulisan yang sistematis dan teratur. Maka penulis menguraikan sistematikanya antara lain sebagai berikut:

Bab kedua berisi tentang landasan teori umum terkait putusnya perkawinan dengan adanya unsur murtad dari segi yuridis dan hukum islam, meliputi pengertian putusnya perkawinan, macam atau bentuk putusnya perkawinan, penyebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, perceraian dengan unsur murtad serta akibatnya berdasarkan yuridis dan hukum islam.

[illegible]

A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Dalam segi yuridis, putusnya perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38 hingga Pasal 44;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dalam Pasal 14 hingga Pasal 36, serta pada Pasal 199 KUHPPerdata;
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 hingga Pasal 128.¹

23

Jika pasangan meninggal dunia, maka secara otomatis ikatan perkawinan diantara keduanya terputus seketika itu juga. Sehingga dalam administrasi hukum statusnya akan berubah menjadi Duda atau Janda cerai mati. Untuk putusnya perkawinan sebab kematian, ketika seorang suami meninggal dunia maka bagi istrinya wajib berkabung dalam masa 'iddahnya sebagai bentuk bela sungkawa atas kepergian suaminya dan agar tidak memicu fitnah. Adapun ketika istri yang meninggal, maka bagi pihak suami hendaknya juga melaksanakan masa berkabung berdasarkan kepatutan.

[illegible]

Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya akibat dari perceraian antara lain:

- a. Bapak atau ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan sa/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²

Lebih tegas lagi diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis amping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biao nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 41.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³

Selain itu, ikatan perkawinan juga dapat putus karena keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁴, dimana hal itu terjadi karena terdapat suatu keadaan sehingga membuat Pengadilan mengeluarkan keputusan tersebut seperti perihal pembatalan perkawinan karena persyaratan saat akad nikah tidak terpenuhi.

Adapun bentuk-bentuk dari putusnya perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Talak

Secara *lughoh* talak diambil dari lafadz “*ithlaq*” yang mempunyai arti meninggalkan, membebaskan, dan melepaskan. Adapun secara istilah syara’ terdapat beberapa rumusan, antara lain:

Menurut Aljaziry

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.⁵

“Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan atau pengurangan pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata yang khusus”.

Menurut Sayyid Sabiq

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.⁶

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Menurut Abu Zakaria AL-Anshari

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum...*, 77.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz 4 (Mesir: Dar al-Irsyad), 249.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

“Melepaskan tali akad nikah dengan menggunakan lafadz talak dan semacamnya”.

Adapun pembagian talak ada beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

1) Talak *sunni*

- a) Talak dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah digauli.
- b) Istri ditalak dalam keadaan suci dari haid.
- c) Istri dapat melaksanakan 'iddah dengan segera setelah penjatuhan talak.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 144.

- 2) Talak *bid'iy*

Yakni penjatuhan talak yang bertentangan dengan ketentuan sunnah. Adapun yang termasuk talak *bid'iy* antara lain:

- a) Penjatuhan talak terhadap istri yang dalam keadaan haid.
- b) Penjatuhan talak kepada istri dalam masa suci tapi pernah digauli di masa suci tersebut.⁹

b. Berdasarkan pengucapan ikrar talak

1) Talak *sharih*

Yakni penjatuhan talak dengan lafadz atau kata yang jelas, tegas, serta mudah dipahami. Menurut Imam Syafi'i, lafadz yang termasuk talak sharih ialah kata *talak*, *firaq*, dan *sarah*. Jika suami mentalak istrinya dengan talak *sharih* maka jatuhlah talak itu seketika selagi pengucapan talaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan kemauannya sendiri.

Contoh : “engkau aku talak sekarang juga”.

2) Talak *kinayah*

[illegible]

Kedudukan talak *kinayah* disesuaikan dengan niat suami. maksudnya, jika suami mengatakan itu dengan maksud mentalak istrinya maka jatuhlah talak. Begitupun sebaliknya, apabila suami mengucapkannya dengan maksud lain bukan talak, maka talak tidak jatuh.¹⁰

1) Talak *raj'i*

¹⁰ Ibid., 147.

2) Talak *ba'in*

a) *Talak ba'in sughro*

(1) Talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*

(2) Talak dengan tebusan (*Khulu'*)

(3) Talak dengan putusan Pengadilan¹²

b) *Talak ba'in kubro*

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 221.

¹² Ibid., 230.

Yang pertama, talaknya tidak jatuh dan dikategorikan pada talak *bid'iy*. Pendapat kedua, talaknya dianggap talak satu. Pendapat ini dipegang oleh Ulama Syiah Imamiyah, Zhahiriyyah, dan al-Hadawiyah. Adapun pendapat ketiga ialah talaknya dianggap sebagai talak tiga sekaligus. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama'.¹³

1) Dengan ucapan, yakni talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya secara langsung.

3) Dengan isyarat, yakni suami menyampaikan maksud talaknya dengan cara isyarat bagi suami yang tuna wicara, selagi isyarat itu jelas bahwa maksudnya adalah talak.

Namun sebagian fuqaha menambahkan syarat bahwa talak

[illegible]

4) Dengan wakil/utusan, yakni penyampaian talak dari suami kepada istri melalui orang lain sebagai perantara.¹⁴

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 149.

Selain itu, disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bahwa apabila ikatan perkawinan putus sebab talak, maka suami berkewajiban dalam beberapa hal, seperti pemberian *mut'ah* yang layak pada istrinya baik berupa barang ataupun uang, pemberian nafkah, *maskan* (tempat tinggal), serta *kiswah* (perlengkapan hidup) kepada istri selama ia dalam masa *'iddah*, membayar mahar yang belum terlunasi, serta pemberian biaya

[illegible]

2. *Khulu'*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i), definisi dari *Khulu'* ialah perceraian berdasarkan permintaan istri dengan memberi *iwadh* kepada dan atas perjanjian suaminya.¹⁷ Di Indonesia *khulu'* biasa merujuk pada istilah cerai gugat.

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 111.

[illegible]

35

Kemudian pendapat kedua bahwa *khulu'* berakibat talak. Pendapat ini dipegang oleh Said bin Musayyab, malik, al-Awza'iy, Hanafiyah, dan ulama-ulama lainnya . Pendapat ini berdalil bahwa meskipun *khulu'* adalah permintaan istri dengan penebusan (*'iwadh*) tetapi talaknya itu diucapkan oleh suami.²⁰

pengajuan dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya sel
Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah
meliputi domisili kediaman istri. Jika suami (Tergugat)
luar negeri, maka pemberitahuan gugatannya dilakuka
perantara Perwakilan Republik Indonesia. Selama proses
berlangsung, Pengadilan Agama dapat memberi izin s

u Qudamah, *al-Mughniy* (Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 328.

3) Ketidakmampuan memberi nafkah.

5) Ta'liq talak, dimana salah satu pihak melanggar perjanjian.²³

Pasal 70

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akd nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dan dengan pria tersebut telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 245-252.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.”²⁴

Pasal 71

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”²⁵

Akibat hukum dari *fasakh* ialah suami tidak boleh merujuk istrinya. Jika ingin kembali bersama maka ia wajib melaksanakan akad nikah yang baru. Selain itu, *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, berarti ia tetap memiliki hak talaknya maksimal tiga kali.²⁶ Dan pembatalan perkawinan ini tidak memutus

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

²⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 123.

Jika suami men*zhihar* istrinya maka terdapat beberapa ketentuan:

- a. Jika suami menyesalinya dan mengharapkan istrinya kembali maka ia harus mencabut zhiharnya dengan membayar *kafarah* berupa memerdekakan budak. Jika suami tidak mampu maka ia dapat menggantinya dengan puasa dua bulan secara beruntut (60 hari). Jika tidak mampu maka dapat dengan memberi makan enam puluh fakir miskin.
- b. Jika menurutnya perkawinan dengan istri mendatangkan *mudharat* dan lebih baik bercerai dalam pertimbangannya, maka hendaknya suami menjatuhkan talak pada istrinya. Kedudukan talak disini sama dengan talak *ba'in sughra* sehingga jika ia berkehendak kembali dengan istrinya maka jalan keluarnya dengan akad nikah baru.
- c. Jika dalam waktu lama suami tak mencabut zhiharnya juga tak mentalak istrinya berarti suami sengaja menelantarkan suaminya dan ini menyiksa istri lebih lama lagi. Sehingga setelah melewati

[illegible]

5. *Ila'*

لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مَنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Syariat membatasi *ila'* selama empat bulan lamanya. Jika suami menyesal dan berkehendak kembali pada istrinya maka ia wajib membayar kafarah sumpah berupa jamuan makanan sepuluh fakir miskin, atau dengan memberi pakaian 10 fakir miskin, atau juga dengan memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka dapat dibayarnya berpuasa 3 hari berturut-turut. Jika selama empat

³⁰ Al-Qur'an, 2 : 226-227.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”³⁴

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

2. Syiqaq

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

[illegible]

Para ulama berselisih pendapat perihal rujuk dengan perbuatan. Jumhur ulama sekaligus Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat bahwa sahnya rujuk ialah dengan ucapan, kecuali jika ia tunawicara maka boleh dengan isyarat yang bisa dipahami. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Sirin, Thawus, al-Hasan, Hanafiyah, dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan diperbolehkan secara mutlak. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan dengan syarat disertai niat rujuk. Sebagian lagi ada yang membolehkan dengan syarat terdapat saksi.³⁸ Mayoritas ulama yang memperbolehkan perbuatan sebagai bentuk rujuk membatasinya pada kegiatan bersetubuh. Sebagian ulama mengkategorikannya lagi pada *khalwat*, seperti perbuatan memandang kelamin pasangan atau menyentuh dengan nafsu.³⁹

Ketika talak *bain* jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan sebagai suami istri, sehingga masing-masing dari mereka telah menjadi orang lain. Adapun hak talak bagi suami adalah tiga kali. Maka ketika terjadi talak satu kali, suami tetap berhak atas dua talak setelah rujuk. Pada talak ini suami tidak berhak merujuk istrinya, ia baru bisa

³⁹ Al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000), 285.

- (1) “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sukurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.”⁴⁰

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153.

4. Akibat *Fasakh*

5. Akibat *Khulu'*

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz II* (Bandung: Pustaka Setia 1999), 70.

Dalam KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 menunjukkan bahwa jelas menjadi bentuk larangan keberlangsungan perkawinan antara orang muslim dengan orang selain muslim.

Adapun dalam KHI tepatnya pada Pasal 116 huruf h menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak rukun dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Istilah murtad juga disebutkan dalam KHI Pasal 75 yang berbunyi:

- Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”⁴⁴

[illegible]

Secara yuridis, diketahui bahwasannya perihal murtad tidak menjadikan ikatan perkawinan batal jika pasangan baik suami atau istri tersebut tidak merasa keberatan atas perbuatan murtad pasangannya sehingga ia tidak memperkarakannya ke Pengadilan, maka perkawinan ini tetap dapat berlanjut.

Adapun dalam hukum Islam, menurut pandangan ahli fiqh perkawinan yang dikemudian hari terdapat unsur murtad maka dapat diajukan perceraian dan perkawinannya dibatalkan demi hukum. sebagaimana juga tertera dalam Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq:

إِذَا ارْتَدَّ الرَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عَلاَقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبَةٌ لِلْفَرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفَرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسْحًا

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Aceh* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10.

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, apabila suami beralih dari agama Islam atau murtad maka secara otomatis ia berpisah dengan istrinya seketika itu juga. Hal ini dikarenakan orang yang kafir tidak mempunyai hak wewenang pada wanita muslim apapun kondisinya. Adapun jika ia bertaubat dan memperbarui pernikahannya dengan istri, maka hal itu tidak menjadikan haknya untuk menjatuhkan talak berkurang. Sehingga ketika ia telah mentalak istrinya untuk yang ketiga kalinya sedangkan yang ketiga tersebut karena kemurtadannya, maka ia tetap berhak kembali pada istrinya tanpa adanya *muhallil*.

Berbeda halnya jika istri yang murtad, maka menurut madzhab hanafi harus dita'zir berupa cambukan atau tahanan sesuai dengan situasinya untuk memberikan efek jera sehingga ia mau kembali memeluk Islam. walaupun setelah itu istri telah kembali muslim, ia tidak halal lagi bagi suaminya melainkan dengan memperbarui akad nikah pun juga maharnya meski sederhana. Jika suami tidak ingin kembali maka istri berhak untuk menikah dengan lelaki lain. Kalau kemurtadan istri itu dilakukan dengan sengaja karena ingin berpisah dari sang suami, maka itu sama sekali tidak membatalkan perkawinan dan perkawinan tetap berlanjut sehingga mereka tidak perlu melakukan pembaruan akad nikah.

Adapun dalam pandangan Madzhab Maliki, apabila suami murtad maka ia terpisah dari istrinya. Jika istri murtad, kemudian diketahui bahwa perbuatan murtadnya dilakukan dengan tujuan berpisah dengan suami, maka hal itu tidak menggugurkan perkawinannya. Berbeda apabila suami yang murtad agar berpisah dengan sang istri, maka gugurlah ikatan pernikahannya. Demikian ini disebabkan suami mempunyai wewenang untuk penjatuhan talak sehingga perbuatan tersebut mengurangi bilangan talak. Mereka juga berpandangan bahwa perbuatan murtad menjadikan pernikahan gugur atau batal sehingga jika ingin kembali maka menggunakan akad baru, dan akibat hukumnya sama dengan talak *ba'in*.⁵¹

Errahman Al-Zujairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka
Muhammad, 2017), 459.
473.

⁵¹ Ibid., 473.

Hubungan perkawinan yang tidak terputus dalam hal ini bukan berarti membolehkan hubungan intim antara suami istri, melainkan tetap terlarang sebab adanya persoalan murtad. Hanya saja, jika persetubuhan tetap terjadi maka hukumannya *ta'zir* bukan *had*, Sebab adanya pandangan masih berlakunya perkawinan. Untuk hal ini apabila istri murtad maka ia tidak mendapat hak nafkah *'iddah*, berbeda jika suami yang murtad maka istri tetap berhak atas nafkah *'iddah*. Perbuatan murtad disini menggugurkan atau membatalkan perkawinan, bukan termasuk talak. Sehingga putusnya perkawinan sebab murtad tidak menjadikan hak talak berkurang.⁵²

480.[illegible]

situasi menggantung itu, maka hukumannya bukan *had* melainkan Persoalan nafkah, apabila istri yang murtad maka ia tidak berhak menerima nafkah. Namun jika suami yang murtad maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah *'iddah* pada istrinya.⁵³

situasi menggantung itu, maka hukumannya bukan *had* melainkan Persoalan nafkah, apabila istri yang murtad maka ia tidak berhak menerima nafkah. Namun jika suami yang murtad maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah *'iddah* pada istrinya.⁵³

**PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI MURTAD
PADA PERKARA NOMOR 0479/PDT.G/2019/PA.SDA**

Perkara cerai gugat ini didaftarkan pada hari Senin tertanggal 21 Januari 2019 dengan nomor perkara 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda. Perkara ini diajukan oleh seorang istri berinisial HW yang statusnya sekaligus sebagai Penggugat, berusia 32 tahun, memeluk agama Islam, karyawan swasta, yang bertempat tinggal Sidoarjo, yang kemudian memberikan surat kuasa khusus pada advokatnya. Dimana ia menggugat cerai suaminya yang berinisial AJ (Tergugat), berusia 49 tahun, pekerja swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo. Adapun duduk perkara yang menjadi dasar gugatan cerai antara lain sebagai berikut¹:

¹ Salinan Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Untuk pembuktian, Penggugat telah memberikan bukti otentik antara lain:

- Selain bukti surat diatas, dalam pembuktiannya Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi guna memperkuat dalil gugatannya dengan perincian sebagai berikut:

⁵ Ibid.

Saksi kedua dengan identitas dari saksi II ini berusia 32 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Kota Surabaya. Dalam sumpahnya, ia memberikan keterangan bahwa dirinya merupakan adik kandung dari Penggugat sehingga kenal dengan dua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). Ia mengetahui juga bahwa pada tanggal 16 April 2011 adalah hari dimana Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dimana kemudian mereka berdua tinggal di kediaman Tergugat tepatnya di Kabupaten Sidoarjo dan hingga saat ini belum

[illegible]

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda

Majelis Hakim PA Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda memberikan beberapa pertimbangan dasar hukum untuk menerima atau mengabulkan gugatan mengingat apa yang dimaksud dan menjadi tujuan dari gugatan Penggugat.

Dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para pihak dengan memberi nasehat pada penggugat agar mau mempertimbangkan lagi perihal gugatannya supaya

[illegible]

Perihal keluarnya Penggugat dari Agama Islam dan kembali pada agamanya semula setelah perkawinan berlangsung, mengingat bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat ialah berdasarkan hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9).⁹

Berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan bahwa ia berdomisili di Kabupaten Sidoarjo yang mana itu termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo maka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Sidoarjo.¹⁰

Dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dirinya dan Tergugat menikah dengan menggunakan hukum Islam yang kemudian keduanya sering bertengkar maka Penggugat menuntut Pengadilan

¹⁰ Ibid.

Penggugat dalam dalam pokok gugatannya menuntut Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberi putusan perceraian yang dilatarbelakangi oleh alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk kembali rukun menjalani rumah tangga yang disebabkan oleh faktor bahwasannya Penggugat tidak mau melaksanakan ibadah selayaknya orang muslim, seperti meninggalkan sholat lima waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, tidak shalat Jum'at, dan lain sebagainya. Padahal Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat perihal ibadah tersebut, mengingat niat awal Tergugat masuk Islam adalah mengikuti suaminya dan berharap agar sang suami dapat menjadi Imam yang baik dengan menuntunnya dan mengajarkannya tentang Islam. Maka dari itu Penggugat beribadah di Gereja dan tetap memeluk agama kristen. Selain itu, Penggugat juga

¹² Ibid.

Dalam persidangan Tergugat tidak hadir pun juga tidak menghadirkan orang lain sebagai wakilnya untuk menyampaikan jawaban dari gugatan Penggugat. Untuk pemenuhan prinsip penegakan keadilan, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya.¹⁴

Untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (P-1) dan fotokopi KTP Penggugat (P-2) yang mana keduanya merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, serta keasliannya sesuai maka nilai pembuktiannya sempurna sebagaimana pasal 165 HIR/1868 KUHPdata.¹⁵

Selain itu, dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan dua saksi dimana keduanya telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan saksi, yang mana selagi keterangan saksi itu dilihat atau

¹⁵ Ibid.

Untuk petitum kedua, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal. Dengan bukti P-1 dan keterangan dua saksi yang bersesuaian, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum Islam.¹⁷

Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari dua saksi yang saling bersesuaian, bahwa telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berkediaman di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo namun belum memiliki keturunan. Dalam kesaksiannya saksi I dan II saling menuturkan bahwa rumah tangga AJ dan HW sering diwarnai perselisihan yang mereka ketahui disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Sehingga ditemukan fakta hukum bahwa keduanya berpisah hingga saat ini terhitung sudah setahun lamanya mereka tak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri. Para saksi, keluarga, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil.¹⁸

Pernikahan merupakan ikatan kukuh yang memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah seperti yang termaktub dalam QS.Ar-Ruum : 21 dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Dalam Islam, perceraian diperbolehkan jika dalam perkawinan tersebut mengandung banyak mudharat daripada kemaslahatannya. Dalam kasus ini majelis hakim menimbang suatu fakta bahwa AJ dan HW sudah tak saling memiliki perasaan saling cinta, apalagi dilihat dari sudut pandang Penggugat yang dengan tegas menyatakan jera bahkan tak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Demikian inilah yang menjadikan solusi perceraian diperbolehkan. Dalam hal ini majelis hakim merujuk pada Pendapat Sayyid Sabiq tepatnya yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

Artinya: “jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”.

[illegible]

Dan dalam kasus ini dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dianggap cukup beralasan untuk dijadikan alasan perceraian dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian Petitum tuntutan Penggugat agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.²¹

²⁰ Ibid.

[illegible]

hukum serta tidak adanya perlawanan hak, sehingga gugatan Penggugat
dikabulkan secara verstek sebagaimana terdapat dalam Pasal 125 HIR.²²

Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka beban biaya Perkara menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana peraturan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.²³

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang bersangkutan dengan kasus perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 M yang bertepatan dengan 23 Jumadil akhir 1440 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh ketua majelis dan dua hakim anggotanya yang telah dibacakan dalam

²² Ibid.

²³ Ibid.

Dalam perkara cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda, Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya di hadapan PPN KUA kecamatan Sukodono pada tanggal 16 April 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/42/IV/2011 dengan menggunakan hukum islam. Awalnya Penggugat memeluk agama Kristen, namun saat sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat telah bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam untuk mengikuti suaminya, bukan hanya untuk melegalkan perkawinannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan mereka jelas sah secara agama maupun hukum negara sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Namun kemudian di tengah berlangsungnya perkawinan, ternyata istri (Penggugat) beralih ke agamanya semula dengan alasan suaminya tidak menuntunnya pada ajaran Islam. Dalam salinan putusan disebutkan bahwa hakim mempertimbangkan untuk menerima pengajuan perkara cerai gugat oleh istri yang murtad sebab penentuan kewenangan pengadilan ialah berdasarkan pemberlakuan hukum saat dilangsungkannya perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 1 angka 37, sebagaimana juga yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983 pada tanggal 31 Agustus 1983. Maka keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menerima pengajuan perkara cerai

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 119

Setiap pengajuan perceraian haruslah diiringi dengan alasan yang kuat dan didukung dengan bukti yang cukup. Dalam perkara ini diketahui bahwa Penggugat menggunakan faktor perselisihan sebagai alasan utama dan memohon agar Pengadilan mengabulkan perceraian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memilih untuk menerima perkara tersebut karena fakta-fakta perselisihan benar terjadi dan dikuatkan oleh para saksi sehingga keputusan untuk mengabulkan pengajuan perceraian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

[illegible]

B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad

Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda ini menggunakan pertimbangan hukum perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba'in sughra.

Menganalisis pada perihal pertengkarannya yang ada dalam perkara tersebut Penggugat menerangkan bahwa tepat sebelum menikah ia menjadi *mu'allaf* untuk mengikuti suami dan berharap agar suaminya dapat mengajar dan menuntunnya tentang agama Islam. Namun yang terjadi adalah Tergugat sendiri tidak melaksanakan ibadah seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, dan puasa bulan Ramadhan. Padahal hukum ibadah tersebut ialah *fardhu 'ain* dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Dengan keterangan tersebut jelas bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang imam yang seharusnya menjadi pemimpin baik secara moril maupun agama bagi keluarganya. Hal ini mempengaruhi spiritual Penggugat hingga akhirnya Penggugat kembali pada agamanya semula yakni kristen. Dalam gugatannya jelas bahwa Penggugat telah berbuat murtad mengingat bahwa selama ini ia beribadah di Gereja. Demikian berarti dalam perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat terdapat unsur murtad.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkara peralihan agama tidak disebutkan sehingga sering dikaitkan dengan pasal sering terjadinya pertengkar. Akan tetapi pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya Pasal 116 huruf (h) mengandung fakta hukum bahwa peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan atau sebab yang mendasari perceraian. Menganalisis dari perumusan redaksi pasal 116 huruf (h) tersebut dapat ditafsirkan kalau adanya peralihan agama atau murtad tidak semata-mata diterima sebagai alasan perceraian, melainkan terdapat ketentuan syarat bahwa peralihan agama itu mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka jika seseorang merasa tidak keberatan atas perbuatan murtad

[illegible]

pasangannya dan tidak memperkarakannya ke Pengadilan, maka perkawinannya tetap berlangsung.

Memang dari segi Undang-Undang perkawinan, permasalahan murtad tidak diatur secara rinci. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam penyebutan murtad ada dalam Pasal 75. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Kalau ditafsirkan maka pasal tersebut mengandung abstrak hukum ketika pasangan atau salah satu dari suami maupun istri murtad maka status perkawinannya batal. Namun dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab IX tentang pembatalan perkawinan, tidak terdapat poin yang menyatakan bahwa perkawinan batal akibat murtad. Sehingga jika dipandang dari segi yuridis pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika telah diajukan ke Pengadilan. Adapun yang dibatalkan adalah status perkawinan setelah adanya perbuatan murtad, bukan sejak awal dilangsungkannya perkawinan.

Dan jika melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan. Pun pula dalam pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan bisa batal apabila tidak memenuhi syarat.

Menurut ulama madzhab hanafiyah, ketika salah satu pasangan baik suami atau istri murtad maka otomatis *fasakh* pernikahannya seketika. Adapun menurut ulama Malikiyah putusnya perkawinan sebab murtad dikategorikan talak. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa perkawinan itu putus apabila murtad terjadi *qabla dukhul*, walaupun telah terjadi *dukhul* maka menunggu *'iddah*nya selesai. Apabila setelah *'iddah* selesai tak juga kembali ke agama Islam, maka perkawinannya rusak. Adapun menurut ulama Hanabilah statusnya ditangguhkan menurut masa *'iddah*. Jika ia bertaubat sebelum *'iddah* habis maka perkawinannya tetap berlangsung, begitupun kebalikannya.

[illegible]

Alangkah baiknya jika Majelis Hakim meneliti lebih mendalam mengenai kebenaran fakta pihak yang bersangkutan tentang persoalan murtad dan mempertimbangkan hukumnya, karena persoalan murtad disini juga berpengaruh pada akibat hukum.

Ketika ikatan perkawinan putus karena talak, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama istri menjalani masa *'iddah*. Namun jika istri murtad, maka ia tak lagi berhak atas nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* karena perbuatan murtadnya. Perihal hak waris, meski dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa perkawinan yang batal tidak merubah hubungan antara orang tua dan anak, namun pihak yang murtad tidak mendapatkan waris dari keluarganya yang muslim. Dan perihal pemeliharaan dan hak asuh anak (*hadhanah*), ketika anak tersebut belum *mumayyiz* maka hak asuh anak biasanya akan diberikan kepada pihak ibu, akan tetapi dapat dipertimbangkan kemaslahatannya untuk dibawah asuhan ayah jika sang ibu terindikasi murtad karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi akidah sang anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 yang mempunyai abstrak hukum bahwa agama merupakan syarat penentuan gugur tidaknya hak ibu atas pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Yang demikian bukan hanya karena putusnya perkawinan tersebut melainkan karena perbuatan murtadnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang telah penulis sampaikan diatas maka terdapat poin kesimpulan, antara lain :

1. Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dalam kasus istri murtad pada nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda menggunakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasnya angka (9), sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kemudian Majelis hakim memberi putusan *talak ba'in sughra* karena merujuk pada pokok gugatan sehingga menggunakan dasar Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) KHI dimana pasal tersebut berarti putusya perceraian disebabkan perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun. Alasan dibalik perselisihannya ialah Tergugat yang tidak menuntun Penggugat padahal ia masuk Islam demi mengikuti suaminya sehingga ia murtad dan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Hasil analisis dari putusan perkara cerai gugat dengan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda ialah secara yuridis, Majelis Hakim

Sebagaimana bagian akhir dari pembahasan, penulis ingin mengemukakan beberapa saran :

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz II. Bandung: Pustaka Setia 1999.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Fath al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4. Mesir : Dar al-Irsyad, t.t.
- Al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000.
- Al-Qur'an
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zujairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* , Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Haryati, Eva. "Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).
- Hemdi, Yoli dan Naura Shafwa. *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jannah, Roikhatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di

Pengadilan Agama Pekanbaru)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

Kompilasi Hukum Islam

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Mahkamah Agung RI. *Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Aceh*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Mashuda. “Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)” (Skripsi—Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019).

Muhammad Jamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Qudamah, Ibnu. *al-Mughniy*. Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, Cet.27. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rosyidah, Jamilatur. “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salinan Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

